IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KEPENDUDUKAN BAGI SUKU ANAK DALAM DI KABUPATEN BATANG HARI

Nama Penulis : Tasya Ayu Puspita
NPP. 29.0375

Asdaf Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: tasyaayueffendi@gmail.com

ABSTRACT

The researcher focuses on the problem of the uneven distribution of population documents for Suku Anak Dalam in Batang Hari Regency. This study aims to determine the implementation of the fulfillment of civil rights for the Suku Anak Dalam in Batang Hari Regency, Jambi Province regarding the role of the government's active system in issuing population documents for the Suku Anak Dalam. The research method used is qualitative research methods, data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. While the data analysis technique used is reduction mode. Based on the observations that have been made, the implementation of efforts to fulfill the rights for SAD in Batang Hari Regency has been carried out but has not run optimally. This is due to the inhibiting factors, namely, among others, there is customary belief in the prohibition of take picture for women and the prohibition of mentioning the names of people who have died, the difficulty of accessing electricity for the E-KTP recording process, the quantity and quality of the apparatus that are still lacking and the low aspects of the confidence of the SAD community in the local government regarding these efforts. Based on the results of the study, the researchers suggest to the Batang Hari Regency Government, especially the related Implementing Agencies, to routinely conduct socialization, counseling, or guidance to the SAD community regarding the use and maintenance of all kinds of assistance that have been provided in terms of fulfilling their resident rights as Indonesian citizens.

Keywords: Implementation, Civil Rights, Suku Anak Dalam

ABSTRAK

Peneliti berfokus pada permasalahan belum meratanya penerbitan dokumen kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pemenuhan Hak Kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi mengenai peran stelsel aktif pemerintah dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi Suku Anak Dalam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model triangulasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, implementasi upaya pemenuhan hak bagiSAD tersebut di Kabupaten Batang Hari sudah dilaksanakan namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu diantaranya terdapat keyakinan adat dalam hal larangan perekaman gambar diri bagi pihak perempuan dan larangan untuk menyebutkan nama orang yang sudah meninggal, sulitnya akses listrik untuk proses perekaman KTP-El, kuantitas dan kualitas aparat yang masih kurang serta rendahnya aspek kepercayaan dari masyarakat SAD terhadap pemerintah setempat mengenai upaya tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari, khususnya Instansi Pelaksana yang terkait untuk rutin mengadakan sosialisasi, penyuluhan, ataupun bimbingan kepada masyarakat SAD terkait pemanfaatan dan pemeliharaan segala macam jenis bantuan yang telah diberikan dalam hal pemenuhan hak kependudukannya sebagai warga negara Indonesia.

Kata kunci :**Implementasi, Hak Kependudukan, Suku Anak Dalam**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak kewarganageraan yang dimiliki manusia tidak terhalang oleh faktor suku, bangsa, ras, agama, maupun gender, karena berdasarkan hakikatnya hak bersifat universal atau menyeluruh termasuk hak untuk memperoleh identitas dan dokumen kependudukan. Perihal ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b telah dijelaskan bahwa memberikan pelayanan yang sama serta handal pada setiap penduduk atas pelaporan kejadian kependudukan serta kejadian berarti lainnya. Pulau Sumatera bagian tengah tepatnya di Provinsi Jambi yang masih mempunyai Komunitas Adat Terpencil yang disebut dengan Suku Anak Dalam (SAD) atau lebih dikenal dengan istilah Suku Kubu. Suku Anak Dalam atau suku kubu tersebar dikawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas yang luasnya kurang lebih sekitar 60.000 hektar, berdasarkan amanat Gubernur Provinsi Jambi melalui Surat Usulan Gubernur Jambi No. 522/51/1973/1984 ditetapkan sebagai Kawasan hidup Orang Rimba. Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas meliputi Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan survey populasi yang dilakukan oleh Balai TNDB pada tahun 2018 yang berlangsung dari tanggal 8 s.d. 18 Maret 2018, tercatat sebanyak 13 kelompok Temenggung Orang Rimba yang bermukim di Kawasan TNBD yaitu Temenggung Jelitai, Temenggung Ngukir, Temenggung Grip, Temenggung Bepayung, Temenggung Nangkus, Temenggung Girang, Temenggung Ngadap, Temenggung Meladang, Temenggung Melimun, Temenggung Celitai, Temenggung Melayu Tuha, Temenggung Nyenong, dan Temenggung Ngamal, dengan jumlah keseluruhan 2.960 jiwa. Dalam upaya pemenuhan hak kependudukan bagi Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam ini, hal ikhwal yang mendasar yaitu pemberian identitas resmi dalam bentuk dokumen kependudukan. Sehingga dengan kepemilikan dokumen kependudukan dimanfaatkan agar mendapatkan pelayanan sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, ataupun pemukiman yang layak. Khususnya pada SAD yang termasuk pada kategori penduduk rentan administrasi kependudukan yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Populasi Suku Anak Dalam berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Taman Nasional Bukit Dua Belas bersamaan dengan BPS Kabupaten Batang Hari tahun 2018 diketahui berjumlah 1.002 jiwa. Dari 1.002 jiwa tersebut hingga Maret 2021, baru 349 penduduk SAD yang terdata dalam database kependudukan. Penerbitan dokumen kependudukan bagi Suku Anak Dalam terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat. Faktor penghambat ini berupa masih kentalnya adat istiadat mereka yang sangat melindungi kaum perempuan sehingga adanya larangan dalam perekaman gambar diri bagi perempuan, enggan menyebutkan nama orang tua yang sudah meninggal, dan pola hidupnya yang nomaden atau berpindah-pindah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan berkaitan dengan pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam terutama melalui upaya penerbitan dokumen kependudukan. Faktor adat istiadat salah satunya. Masih kentalnya budaya mereka terhadap adat leluhur seperti adanya larangan perekaman gambar diri bagi pihak perempuan maupun larangan penyebutan nama orang yang sudah meninggal dapat menghambat alur dari penerbitan dokumen kependudukan. Jika ada pihak luar yang diam-diam melanggar aturan tersebut maka mereka akan memberlakukan hukuman adat berupa denda. Namun upaya

layanan penerbitan dokumen kependudukan bagi SAD tetap harus dilaksanakan hal ini mengingat amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Selain itu juga terdapat budaya melangun atau kegiatan berpindah-pindah jikalau ada saudara yang meninggal dunia menjadikan masyarakat SAD sulit untuk didata secara administratif. Permasalahan lainnya yaitu penerbitan dokumen kependudukan bagi SAD ini yaitu terdapat masyarakat yang masih buta huruf dan belum memahami Bahasa Indonesia. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas terutama pada saat pengisian formulir sehingga petugas harus membantu mengisikannya satu persatu. Ditambah lagi jumlah petugas layanan yang kurang memadai mengakibatkan proses perekaman berjalan lambat dan membuat masyarakat SAD lainnya menunggu lama. Tidak dapat dipungkiri naluriah sebagai seorang manusia tentu saja memiliki rasa jenuh ataupun bosan dalam hal menunggu. Sama halnya dengan masyarakat SAD yang juga merasakan kebosanan ketika disuruh antri menunggu giliran perekaman.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu dalam konteks pemenuhan hak melalui layanan administrasi kependudukan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT). Penelitian dari Iwan Candra (2019) yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Kewarganegaraan Suku Anak Dalam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak kewarganegaraan Suku Anak Dalam (SAD). Hasil dari penelitian tersebut peneliti menemukan hak-hak kewarganegaraan di daerah Suku Anak Dalam Sebagian sudah terpenuhi namun masih ada hak-hak yang belum terpenuhi. Penelitian ini memfokuskan pada tinjauan regulasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2016 tentang Kewarganegaraan terhadap Suku Anak Dalam. Kemudian dalam penelitian yang berjudul "Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu" ditulis oleh Wika Difa Kartini pada tahun 2019, permasalahan terhadap pelayanan administrasi kependudukan KAT yang terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Wika Difa Kartini yaitu minimnya partisipasi Suku Talang Mamak dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan hal ini dikarenakan Suku Talang Mamak masih tidak terpengaruh budaya luar. Adapun kajian yang dilakukan oleh Asnawati (2014) dengan mengusung judul "Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Baduy". Dari segi permasalahan penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh Asnawati pada tahun 2014 membahas mengenai pelayanan administarsi kependudukan bagi KAT Suku Baduy yang ditinjau dari aspek pengisian kolom agama pada KTP-el. Hal ini diakibatkan oleh karena kepercayaan mereka yang belum diakui oleh negara sehingga sering terjadi kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam melalui layanan penerbitan dokumen kependudukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan berdasarkan Grounded Theory. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian yaitu didasari oleh teori implementasi yang dikemukakan George C. Edward III (2003) yang menyatakan bahwa implementasi dapat dipengaruhi oleh empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses implementasi pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari, kemudian ntuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari, serta untuk mengetahui kondisi kehidupan Suku Anak Dalam setelah mendapat layanan penerbitan dokumen kependudukan.

II. METODE

Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti mampu memaknai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yaitu yang berkaitan tentang peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari mengenai penerbitan dokumen kependudukan bagi Suku Anak Dalam terhadap upaya pemenuhan hak kependudukan di Kabupaten Batang Hari serta bagaimana kondisi dan gejala yang dihadapi saat melakukan upaya tersebut sehingga peneliti mampu mengamati dan menuangkannya ke dalam hasil penelitian. Dalam riset ini penulis menerapkan rancangan riset etnografi dan grounded theory. Hal ini didasari dari pendapat Creswell yang menerangkan bahwa terdapat beberapa rancangan penelitian dalam kualitatif diantaranya penelitian naratif, riset fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Dengan mengakomodasikan tujuan dari riset yang akan dilakukan ini yaitu untuk mendalami serta memahami lebih jauh terhadap pola sikap, Bahasa, serta aksi dari suatu kelompok kebudayaan yang jadi target dari riset ini, yaitu penduduk rentan administrasi kependudukan dalam perihal ini Komunitas Terpencil Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari yang belum merasakan layanan yang diberikan oleh pemerintah akibat dari belum meratanya perekamanan serta pendataan identitas penduduk untuk penerbitan dokumen kependudukan. Upaya untuk menelaah kasus kebudayaan inilah salah satu tugas dari pakar ilmu kependudukan dalam mendalami bidang keilmuannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Program SLAMDUNG Dalam Penerbitan Kartu Keluarga

3.1.1 Komunikasi

Teori Edward III (2003:11) menjelaskan bahwa komunikasi akan mempengaruhi sebuah kebijakan dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Dalam penelitian ini, dimensi komunikasi diwujudkan dengan adanya sosialisasi ataupun penyuluhan terlebih dahulu kepada ketua adat SAD atau yang lebih dikenal dengan istilah temenggung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari mengadakan forum untuk menjelaskan maksud dan

tujuan, pengenalan administrasi kependudukan, pentingnya dokumen kependudukan, serta prosedur pelayanan jemput bola yang dilakukan. Hal ini pertama kali didiskusikan kepada temenggung karena temenggung inilah yang merupakan orang kepercayaan mereka, sehingga temenggung yang akan menyampaikan kembali kepada anggota kelompoknya baik menggunakan Bahasa mereka ataupun ada juga SAD yang sudah paham Bahasa Indonesia.

3.1.2 Sumber Daya

Sumber daya memegang peranan yang penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan untuk mendukung suatu pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif. Sesuai dengan teori Edward III (2003:11-14) bahwa sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya berupa manusia, yaitu aparat atau pegawai yang melaksanakan kebijakan. Selanjutnya adalah sumber daya finansial, yaitu anggaran atau pembiayaan yang mendukung operasionalisasi jalannya suatu kebijakan. Pada penelitian ini sumberdaya meninjau beberapa indicator yaitu staf, sarana dan prasana, fasilitas, hingga wewenang. Dalam pelaksanaannya indicator wewenang sudah berjalan baik, namun masih terdapat kekurangan pada indicator staf, sarana dan prasarana, serta fasilitas. Dalam hal ini bukan berarti tidak ada, melainkan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan layanan.

3.1.3 Disposisi

Teori implementasi kebijakan Edwards III menerangkan bahwa disposisi adalah sikap atau karakter pelaksana kebijakan. Fakta dilapangan menunjukkan, sudah adanya sikap dan karakter yang mendukung terlaksananya kebijakan. Hal ini terlihat dari adanya respon yang baik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari mengenai implementasi pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari. Setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari langsung menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai pedoman untuk persyaratan dalam menerbitkan dokumen kependudukan bagi SAD, dimana Permendagri tersebut dimasukkan ke dalam standar pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Edwards III (2003:11) menyatakan bahwa variabel struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan Fragmentasi. Adanya prosedur yang sesuai standar tentu akan memudahkan terlaksananya suatu kebijakan. Dengan tidak menimbulkan suatu kerumitan dan hal-hal yang sulit dimengerti, yang akan menimbulkan suatu ketidakjelasan serta implementasi kebijakan yang tidak efektif dan efisien. Implementasi pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari ini tentu dipengaruhi oleh pemahaman dari masyarakat SAD di Kabupaten Batang Hari itu sendiri. Sehingga Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil harus menciptakan SOP yang jelas bagi masyarakat SAD Kabupaten Batang Hari yang bisa dikemas dengan baik dalam bentuk sosialisasi atau turun langsung ke lapangan. Setidaknya masyarakat SAD akan mengetahui bahwa dalam memiliki dan mengurus dokumen kependudukan menggunakan alur yang telah diatur.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi pemenuhan hak kependudukan bagi SAD di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi ini memberikan dampak positif di berbagai masyarakat dalam rangka mempermudah masyarakat SAD dalam mengurus administrasi kependudukan sehingga memfasilitasi masyarakat SAD agar bisa tertib administrasi kependudukan terkhusus dalam pengurusan dokumen kependudukan sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatankan pelayanan lainnya akan tetapi pelaksanaan program tersebut belum berjalan secara optimal karena dari 4 dimensi terdapat 3 dimensi yang belum berjalan dengan baik yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan 1 dimensi yang sudah berjalan dengan baik yaitu dimensi disposisi. sama halnya seperti temuan Iwan Candra, 2019. Namun beberapa kendala juga masih ditemui dalam pelaksanaan yang dilakukan yaitu masih banyaknya masyarakat yang mematuhi aturan adatnya dan masih buta huruf serta Sebagian belum memahami Bahasa Indonesia.

Selain itu, penelitian ini pun berbeda dari temuan oleh Wika Difa Kartini pada tahun 2019, permasalahan terhadap pelayanan administrasi kependudukan KAT yang terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Wika Difa Kartini yaitu minimnya partisipasi Suku Talang Mamak dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan hal ini dikarenakan Suku Talang Mamak masih tidak terpengaruh budaya luar. Selanjutnya implementasi pemenuhan hak kependudukan bagi suku anak dalam di Kabupaten Batang Hari lebih fokus ke pemenuhan hak secara umum. Adapun kajian yang dilakukan oleh Asnawati (2014) dengan mengusung judul "Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Baduy". Dari segi permasalahan penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh Asnawati pada tahun 2014 membahas mengenai pelayanan administarsi kependudukan bagi KAT Suku Baduy yang ditinjau dari aspek pengisian kolom agama pada KTP-el. Hal ini diakibatkan oleh karena kepercayaan mereka yang belum diakui oleh negara sehingga sering terjadi kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan.

3.3 Diskusi temuan menarik lainnya

Penulis menemukan beberapa kendala dalam mengenai Pemenuhan Hak Kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari bahwa Implementasi Pemenuhan Hak Kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari yang dianalisis menggunakan teori dari George Edward III telah terlaksana namun masih belum optimal atau belum sepenuhnya terlaksana, kemudian masih terdapat hambatan dalam Implementasi Pemenuhan Hak Kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari yaitu dari segi aturan adat, tingginya angka buta huruf, dan pegawai pelaksana serta sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kondisi kehidupan Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari setelah mendapatkan dokumen kependudukan dirasa sudah cukup setara dengan masyarakat lainnya dengan ditinjau dari beberapa aspek yaitu tempat tinggal, kesehatan, budaya melangun, kepercayaan, dan pendidikan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Implementasi Pemenuhan Hak Kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari yaitu berkoordinasi kepada Dinas Sosial terkait pemenuhan hak kependudukan bagi Komunitas Adat Terpencil, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, dan memberikan sosialisasi serta pemahaman secara terus menerus kepada masyarakat mengenai program layanan jemput bola dalam kepengurusan dokumen kependudukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan mengenai Pemenuhan Hak Kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari bahwa implementasi pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari yang dianalisis menggunakan teori dari George Edward III telah terlaksana namun masih belum optimal atau belum sepenuhnya terlaksana. Kemudian masih terdapat hambatan dalam implementasi pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari yaitu dari segi aturan adat, tingginya angka buta huruf, dan pegawai pelaksana serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Serta kondisi kehidupan Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari setelah mendapatkan dokumen kependudukan dirasa sudah cukup setara dengan masyarakat lainnya dengan ditinjau dari beberapa aspek yaitu tempat tinggal, kesehatan, budaya melangun, kepercayaan, dan pendidikan. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni dari segi waktu dan biaya penelitian. Kemudian peneliti juga menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori pelaksanaan menurut Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak kependudukan bagi SAD untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepads peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2020. “Dasar-dasar Kebijakan Publik”. Bandung: Alfabeta.

Asnawati, 2014, “Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Baduy”. Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 13.

Creswell, John W. 2013. “Research Design Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen”. Pustaka Pelajar.

Ginting, Miko., 2020. “Jaminan Hak Sipil Dalam Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Selama Pandemic Covid-19”, Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform.

Hartono dkk. 2010. “Profil Suku Anak Dalam (SAD) Hasil Sensus Penduduk 2010”. Jambi: BPS Provinsi Jambi

Hermansyah, Peri. 2019. “Mengenal Orang Rimba Di Taman Nasional Bukit Duabelas”. Sarolangun: Balai Taman Nasional Bukit Duabelas.

https://batanghari.bps.go.id diakses pada 3 September 2021
https://dukcapil.kemendagri.go.id/ diakses pada 21 September 2021
https://jambi.bps.go.id diakses pada 15 September 2021
Kartini, Wika Difa, 2019. "Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabuapaten Indragiri Hulu", JOM FISIP Vol.6, Pekanbaru:Print.
Saragih, E. H, 2013, "Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasunduta", 1–12.
Wahanu Prabandani, Hendra, 2011, "Pembangunan Hukum Berbasis Lokal", edisi 01.
Yana, Permatasari, 2014, "Implementasi Pelayanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Kabupaten Malang)"